

**STUDI DIMENSI *VALUE INFUSION* DAN *DECISIONAL AUTHONOMY*
DALAM INSTITUSIONALISASI KEPARTAIAAN PPP KABUPATEN
TASIKMALAYA PASCA REFORMASI**

Oleh :

**Subhan Agung¹
Hendra Gunawan²**

RINGKASAN

Penelitian ini mengkaji topik tentang Studi Dimensi *Value Infusion* dan *Authonomy* dalam Institusionalisasi Kepartaiaan PPP Kabupaten Tasikmalaya Pasca Reformasi. Penelitian ini merupakan lanjutan dari penelitian kami sebelumnya yang berfokus dalam studi Dimensi *Systemness* dan Citra Publik dalam Institusionalisasi Kepartaiaan PPP Kabupaten Tasikmalaya yang sebelumnya dibiayai oleh LPPM Universitas Siliwangi tahun 2013.

Kajian lanjutan ini diilhami dari penelitian sebelumnya yang menyimpulkan bahwa PPP di Kabupaten Tasikmalaya merupakan partai yang mapan, hal-hal yang terkait dengan masalah internal dapat diselesaikan dengan mudah dengan mengacu kepada apa yang menjadi ketentuan dalam peraturan kepartaiaan (AD/ART). Kedewasaan dan kemapanan tersebut merupakan bentuk nyata selama puluhan tahun PPP eksis dalam perpolitikan nasional, khususnya di Tasikmalaya. Kesulitan-kesulitan yang didapatkan PPP di tingkat nasional sama sekali tidak terjadi di lokal Tasikmalaya. Citra positif yang muncul di masyarakat dan para konstituen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dibentuk oleh pencitraan-pencitraan penting yakni PPP mendeklarasikan partainya sebagai partai kalangan Nahdhiyin, walaupun sesungguhnya tidaklah demikian. Namun strategi tersebut akhirnya berhasil menempatkan PPP sebagai pemenang dalam berbagai perhelatan politik. Namun kelemahan penelitian kami sebelumnya adalah belum secara holistik mengkaji tabel empat sel seperti yang dihadirkan Randall dan Svasand yakni dimensi *value infusion* dan *authonomy* sehingga kurang lengkap kajiannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, secara *decisional authonomy* PPP di Kabupaten Tasikmalaya merupakan partai yang mapan, hal-hal yang terkait dengan masalah internal dapat diselesaikan lewat kebijakan yang dibuat dengan berpedoman terhadap peraturan kepartaiaan (AD/ART). Kedewasaan dan kemapanan tersebut merupakan bentuk nyata selama puluhan tahun PPP eksis dalam perpolitikan nasional, khususnya di Tasikmalaya. Kedua, bahwa penanaman nilai-nilai kepartaiaan (*value infusion*) dilakukan melalui pertemuan-pertemuan rutin, pengajian, ajakan ulama yang merupakan figure yang dituakan oleh PPP Kabupaten Tasikmalaya. Hal ini juga efektif dalam mempengaruhi konstituen di Tasikmalaya. Kemenangan UU Ruzhanul Ulum dalam Pemilu langsung tahun 2011 menjadi bukti kuat bahwa Orang Pesantren

¹ Dosen FISIP Universitas Siliwangi, alamat email subhanagung@unsil.ac.id

² Dosen FISIP Universitas Siliwangi, alamat email hendragunawan@unsil.ac.id

dapat menjadi Orang Nomor Satu di Kabupaten Tasikmalaya dengan PPP sebagai kendaraan politiknya. Gambaran ini menguatkan konsep dan teorinya Randall dan Svasand (2002) yang mengemukakan bahwa semakin intensif dan maksimalnya dimensi-dimensi institusionalisasi dijalankan oleh partai, maka partai tersebut akan semakin mantap dan populer bahkan memudahkan dalam penguasaan ranah publik dan negara. Hal tersebut jelas terbukti dalam gambaran di Kabupaten Tasikmalaya seperti yang telah dijelaskan di atas.

Kata Kunci : Institusionalisasi Kepartaian, *Value Infusion*, *Authonomy*, PPP

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penelitian ini akan mengkaji tentang proses pelembagaan (institusionalisasi) kepartaian Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Tasikmalaya. Penelitian ini merupakan tindak lanjut dari penelitian kami sebelumnya yang mengkaji tentang institusionalisasi kepartaian dengan fokus terhadap dimensi *systemness* dan citra publik (*reification*) yang melahirkan kesimpulan bahwa PPP di Kabupaten Tasikmalaya merupakan partai yang mapan, hal-hal yang terkait dengan masalah internal dapat diselesaikan dengan mudah dengan mengacu kepada apa yang menjadi ketentuan dalam peraturan kepartaian (AD/ART).

Kedewasaan dan kemapanan tersebut merupakan bentuk nyata selama puluhan tahun PPP eksis dalam perpolitikan nasional, khususnya di Tasikmalaya. Selain itu juga, citra positif yang muncul di masyarakat dan para konstituen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dibentuk oleh pencitraan-pencitraan penting yakni PPP mendeklarasikan partainya sebagai partai kalangan Nahdiiyin, walaupun

sesungguhnya tidaklah demikian. Namun strategi tersebut akhirnya berhasil menempatkan PPP sebagai pemenang dalam berbagai perhelatan politik. Hal lain yang juga diangkat sebagai isu penting di Tasikmalaya oleh PPP adalah partainya Orang Pesantren dan Partainya Para Ulama Kharismatik. Selain itu juga lewat upaya perbaikan sistem (dimensi kesisteman) yang baik dan perbaikan citra yang terus-menerus (reifikasi) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mewujud dari partai “gurem” menjadi Partai Penguasa di Tasikmalaya, baik penguasa di ranah eksekutif maupun legislatif sejak Pasca Reformasi sampai sekarang. “Kuku-kuku” pencitraan dan penginternalisasian partai lewat birokrasi juga membentuk *image* baru sebagai partainya penguasa di Kabupaten Tasikmalaya.

Dari fenomena dan fakta politik di atas, kajian ini akan mendekati sempurna jika dilanjutkan dengan kajian dalam institusionalisasi kepartaian sebagaimana yang didalilkan oleh Randall dan Svasand (2003) tentang empat metrik institusionalisasi kepartaian, dimana salah satunya telah diteliti dalam penelitian kami yakni dimensi *systemness* dan reifikasi, sedangkan dua dimensi yang juga tidak kalah pentingnya belum dikaji dalam penelitian kami sebelumnya, yakni dimensi otonomi kepartaian (*decisional authonomy*) dan dimensi identitas nilai (*value invusion*) dalam pelebagaan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Tasikmalaya.

Oleh karena pertimbangan tersebut di atas, kami tertantang untuk melanjutkan penelitian kami sebelumnya tersebut dengan meneliti pelebagaan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Tasikmalaya pasca Reformasi dalam dimensi identitas nilai dan otonomi kebijakan partai. Kedua dimensi ini akan

melihat lebih holistic institusionalisasi kepartaian PPP Kabupaten Tasikmalaya secara utuh nantinya.

1.2. Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah dimensi otonomi kepartaian (*decisional authonomy*) dan dimensi identitas nilai (*value invasion*) dalam pelebagaan kepartaian yang dilakukan oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Tasikmalaya sehingga mampu mempertahankan dominasinya dalam perpolitikan lokal di Kabupaten Tasikmalaya ?.

BAB II. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

2.1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis institusionalisasi kepartaian yang dilakukan oleh PPP Kabupaten Tasikmalaya, khususnya dimensi identitas nilai dan dimensi otonomi dalam kebijakan partai, sehingga Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mewujudkan menjadi partai penguasa, khususnya dalam politik lokal di Kabupaten Tasikmalaya.

2.2. Kegunaan Penelitian dan Target Penelitian

Akademis, untuk menambah *khazanah* ilmu pengetahuan khususnya ilmu politik dalam hal kajian institusionalisasi kepartaian; bagaimana teori institusionalisasi kepartaian diuji dalam menganalisis institusionalisasi kepartaian dalam konteks politik lokal

Praktis, dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pihak terkait dalam memahami survivalitas sebuah partai politik, tumbuh dan berkembangnya partai,

dan juga model pengelolaan partai politik, baik nasional maupun lokal. Target penelitian ini adalah menjadikan penelitian yang bermanfaat, dengan analisis dan kajian yang sederhana, namun memiliki manfaat besar baik secara akademis maupun secara praktis sebagaimana yang diharapkan dalam kegunaan penelitian ini

2.3. Fokus Penelitian

Penelitian ini akan memfokuskan kajian pada dua model institusionalisasi kepartaian menurut ilmuwan politik Randall dan Svasand dari 4 model yang ada. Oleh karena itu, lebih fokus penelitian ini mengkaji dimensi otonomi dalam kebijakan dan dimensi nilai dalam institusionalisasi PPP di Kabupaten Tasikmalaya dari mulai Reformasi sampai sekarang.

BAB III. TINJAUAN PUSTAKA

3.1. *State of The Art*

3.1.1. Teori Institusionalisasi Kepartaian

Kajian teoritis yang akan digunakan dalam menggambarkan *reification* partai Golkar ini adalah bersumber dari kajiannya Randall dan Svasand³. Dua pemikir ini sebelumnya melihat dari kajian-kajian institusionalisasi kepartaian Selznick (1957) Huntington (1968), Kenneth Janda (1980), Panebianco (1988) dan terbaru Levitsky (1998). Keduanya menggunakan istilah-istilah yang oleh ilmuwan-ilmuwan di atas pernah dipakai dalam bentuk kajian metriks yang unik. Model ini mereka gunakan untuk mengkaji institusionalisasi kepartaian di Dunia Ketiga semisal Argentina, Malaysia termasuk Indonesia. Model metriks Randall dan Svasand ini juga digunakan Akbar Tandjung (2007)⁴ sebagai kerangka teoritik dalam membaca institusionalisasi Partai Golkar pasca jatuhnya Soeharto dan juga

³ Vicky Randall dan Lars Svasand (2002), *Party Institutionalization in New Democracies, Party Politics*, Vol.8 No.1, Sage Publication, London, hal 5-29, atau didownload di <http://ppq.sagepub.com>.

⁴Lihat dalam Akbar Tandjung, 2007, *The Golkar Way : Survival Partai Golkar dalam Turbulensi Politik Era Transisi*, Gramedia, Jakarta.

yang terbaru dipakai oleh Tomsa yang juga sama untuk membaca institusionalisasi Partai Golkar Pasca Soeharto (2008)⁵.

3.1.2. Dimensi-Dimensi Institusionalisasi Partai

Pelembagaan partai politik dalam Randall dan Svasand⁶ adalah proses pemantapan partai politik baik secara struktural dalam rangka mempolakan perilaku maupun secara kultural dalam mempolakan sikap dan budaya (*the process by which the party becomes established in terms of both integrated patterns on behavior and of attitudes and culture*). Proses pelembagaan ini mengandung dua aspek, yaitu aspek internal-eksternal dan aspek struktural-kultural. Bila kedua dimensi ini dipersilangkan, maka akan tampak sebuah tabel empat sel, yaitu ; *pertama*, dimensi kesisteman (*systemness*) suatu partai sebagai hasil persilangan aspek internal dengan struktural. *Kedua*, dimensi identitas nilai (*value infusion*) suatu partai sebagai hasil persilangan aspek internal dengan kultural. *Ketiga*, dimensi otonomi suatu partai dalam pembuatan keputusan (*decisional autonomy*) sebagai hasil persilangan aspek eksternal-struktural. *Keempat*, dimensi pengetahuan atau citra publik (*reification*) terhadap suatu partai politik sebagai persilangan aspek eksternal-kultural.

⁵Lihat dalam Dirk Tomsa (2008), *Party Politics and Democratization in Indonesia : Golkar in The Post-Soeharto Era*, Routledge, London and Newyork.

⁶ Ibid, hal.11

Dimensi Kepartaian	Internal	Eksternal
Struktural	Kesisteman	Otonomi
Kultural	Identitas Nilai	Citra pada Publik

Sumber : Randall-Svasand (2002 :13).

Gambar 1. Metriks Dimensi-Dimensi Institusionalisasi Kepartaian

Pertama, dimensi kesisteman adalah proses pelaksanaan fungsi-fungsi partai politik, termasuk penyelesaian konflik, dilakukan menurut aturan, persyaratan, prosedur dan mekanisme yang disepakati dan ditetapkan dalam AD/ART partai politik. *Kedua*, dimensi identitas nilai ini berkaitan dengan identitas partai politik berdasarkan ideologi atau *platform* partai dan karena itu berdasarkan basis sosial pendukungnya dan identifikasi anggota terhadap pola dan arah perjuangan yang diperjuangkan partai politik tersebut. *Ketiga*, dimensi otonomi suatu partai politik dalam pembuatan keputusan berkaitan dengan hubungan partai dengan aktor luar partai, baik dengan sumber otoritas tertentu (penguasa, pemerintah), maupun dengan sumber dana (pengusaha, penguasa, negara atau lembaga luar) dan sumber dukungan massa (organisasi masyarakat). *Keempat*, dimensi pengetahuan publik tentang partai politik, merujuk pada pertanyaan apakah keberadaan partai politik tersebut telah tertanam pada imajinasi publik dan bagaimana pihak lain menyesuaikan dengan visi-misinya⁷.

Dari tulisan di atas, terpetakanlah dalam ranah mana penulis memfokuskan kajian, yakni memfokuskan pada salah satu dimensi pelebagaan partai politik yaitu pembangunan citra partai politik (*reification*). Hal inilah yang akan dikaji

⁷Ibid, hal. 10-11

kemudian dalam konteks Partai Golkar masa kepemimpinan Akbar Tandjung. Kajian dimensi yang lain jika ada hanya sebagai pelengkap argumen, jika hal tersebut berkaitan dengan citra partai ke publik. Hal ini dimungkinkan terjadi, karena pada dasarnya metrik Randall dan Svasand ini *include* antara satu dimensi dengan dimensi lainnya.

3.1.3. Konsep *Reification* Kepartaian

Sebagai mana dibahas di atas, *reification* merupakan salah satu dimensi dalam kajian institusionalisasi kepartaian. *Reification* maksudnya adalah bagaimana partai mampu memberikan citra ke public yang mampu mengangkat nilai kesetiaan konstituen dalam memberikan dukungannya. Selain itu juga bagaimana partai mampu menjelmakan institusinya sebagai institusi yang memiliki nilai positif dan membawa *impact* positif dalam mendapatkan pilihan konstituen sebanyak-banyaknya.

Derajat pengetahuan publik tentang partai politik merujuk pada pertanyaan apakah keberadaan partai politik tersebut telah tertanam pada imajinasi publik. Bila keberadaan partai politik tertentu telah tertanam pada imajinasi publik, maka pihak lain baik para individu maupun lembaga akan menyesuaikan aspirasi dan harapan ataupun sikap dan perilaku mereka dengan keberadaan partai politik tersebut. Derajat pengetahuan publik ini merupakan fungsi dari waktu dan kiprah partai tersebut.

Konsep citra terkait dengan imajinasi publik terhadap partai tertentu yang berdasar dari fakta dan informasi yang ada akan eksistensi partai tertentu. Dalam

konteks ini reifikasi akan banyak bicara politik simbol yang dimainkan partai, *flat-form* partai yang populis dan implementasi *flat-form* yang masif.

Kajian tentang *reification* Golkar pasca jatuhnya Soeharto pada masa kepemimpinan Akbar Tandjung ini akan menggunakan kerangka kajian seperti yang dijelaskan di atas, yang meliputi : *pertama*, upaya perubahan atribut dan simbol-simbol Golkar sebagai partai penguasa dan anti-demokrasi lewat ulasan tentang politik simbol. *Kedua*, imaji tersebut tidak hanya sekedar tertanam, namun juga menjadi penggerak untuk bersepaham dengan *flatform* dan kultur politik Golkar dengan menjadi bagian dari konstituennya yang diulas lewat penataan internal partai yang berdampak pada citra partai ke publik. *Ketiga*, citra publik yang maksimum akan terbentuk ketika *flatform* partai tersebut dimanifestkan dalam berbagai kebijakan yang menyesuaikan dengan kehendak konstituen, baik di parlemen, eksekutif atau lembaga politik lainnya yang akan dibahas dalam pencitraan lewat kebijakan yang populis.

3.2. Penelitian Terdahulu

Kajian ini diilhami oleh kajian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Randall dan Svasand pada tahun 2002 dalam studinya tentang Institusionalisasi Kepartaian di Negara Demokrasi Baru (Negara yang sedang berkembang). Kerangka teoritik yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengambil dari kerangka teoritik yang dikembangkan oleh Randall dan Svasand tersebut tentang metric 4 dimensi institusionalisasi kepartaian seperti yang telah diulas dalam kajian teoritik di atas⁸.

⁸ Randall dan Svasand (2002)

Kajian lainnya yang pernah dilakukan dan menggunakan konsep metrika Randall dan Svasand ini adalah kajiannya Dirk Tomsa tentang kajian institusionalisasi kepartaian Golkar pasca Soeharto di tahun 2008, sebelumnya Akbar Tanjung juga melakukan penelitian tentang institusionalisasi kepartaian menggunakan kerangka teoritik dari Svasand ini di tahun 2007 yang melahirkan buku fenomenal yakni *The Golkar Way : Survival Partai Golkar dalam Turbulensi Politik Masa Transisi*. Pada dasarnya ketika menggunakan frame konsep ini selalu tulisan yang berusaha dikembangkan oleh para peneliti adalah bagaimana partai-partai tersebut bangkit dari keterpurukan, atau berusaha menemukan kembali kebesarannya yang pernah ada. Munculnya penelitian-penelitian ini khususnya di Indonesia disebabkan saat itu konteksnya kejatuhan Golkar yang banyak dicerca oleh masyarakat pasca Reformasi dan kejatuhan Orde Baru.

Relevansi penelitian yang akan dilakukan saat ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah fenomena menguatnya Partai Persatuan Pembangunan di lokal Tasikmalaya. Hal ini tentu saja menarik untuk dikaji lebih lanjut dan tentunya akan sangat berbeda kajiannya jika dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang pernah ada. Dengan konsep yang tidak berbeda jauh, tetapi konteks, sejarah, dan perkembangan PPP yang unik, khususnya di Kabupaten Tasikmalaya diharapkan akan menghasilkan kajian baru yang menambah temuan ilmiah, baik untuk studi lain, maupun untuk studi lanjutan di masa yang akan datang.

BAB IV. OBJEK DAN METODE PENELITIAN

4.1. Objek Penelitian

Adapun yang menjadi sasaran penelitian ini adalah elit-elit politik (tokoh dan pimpinan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Tasikmalaya, mantan bupati dan Bupati Tasikmalaya dari PPP. Untuk pembanding juga ditambah informan dari konstituen PPP yang dianggap mewakili, dan Parpol lain di Kabupaten Tasikmalaya yang selama ini berinteraksi dalam perpolitik lokal Tasikmalaya.

4.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Kabupaten Tasikmalaya.

4.3. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Secara teknis metode penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif seperti ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang yang menjadi subyek penelitian. Pendekatan ini langsung menunjuk *setting* dan individu-individu dalam *setting* itu secara keseluruhan, subyek penelitian baik berupa kelompok, organisasi ataupun individu itu sendiri. Ini tidak akan dipersempit menjadi variabel terpisah atau hipotesis, melainkan dipandang secara keseluruhan.

Dalam model penelitian ini, peneliti mencoba menggali fakta di lapangan dari fenomena yang diteliti, yang kemudian dianalisis dengan analisa deskriptif. Dalam penelitian deskriptif, peneliti tidak melakukan uji terhadap hipotesis seperti lazimnya yang dilakukan pada penelitian kuantitatif, tetapi memberikan gambaran secara deskriptif berdasarkan temuan-temuan yang muncul di lapangan dengan didukung oleh data yang diperoleh.

4.4. Sumber Data

Adapun sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi:

4.4.1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari nara sumber, baik responden maupun informan, melalui wawancara atau dengan penggunaan daftar pertanyaan/kuisisioner.

4.4.2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain, misal dalam bentuk tabel atau diagram-diagram.

4.5. Teknik Pemilihan Informan

Cara menjaring informan adalah dengan menggunakan teknik *purposive sampling* atau sampel bertujuan. Penggunaan *purposive* tidak menunjuk pada keterwakilan akan tetapi sebagai sarana untuk menjaring informasi sedalam mungkin sehingga apabila terjadi data yang seragam dari informan, dapat

dihentikan. Jadi pengambilan sampel ini tidak tergantung pada jumlah akan tetapi berdasarkan informasi sejauh mana data yang diperoleh dapat menjawab. Dalam penelitian ini informan merupakan elit-elit politik yang terlibat dalam perhelatan Pemilu pada Tasikmalaya 2012.

4.6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peliputan data akan dilakukan melalui tiga cara yaitu:

4.6.1. Wawancara mendalam

Wawancara mendalam adalah mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, kelompok, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, kebulatan; mengkonstruksi kebulatan-kebulatan sedemikian rupa sehingga yang dialami masa lalu dapat memproyeksikan kebulatan-kebulatan sebagaimana yang telah diharapkan untuk memperluas konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti, sebagian besar dari pengecekan anggota (Lincoln dan Guba dalam Moleong, 1999).

4.6.2. Observasi

Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan upaya pengumpulan data-data yang dilakukan secara sistematis. Disini, peneliti melibatkan diri dan melakukan pengamatan secara langsung terhadap aktivitas yang sedang berjalan guna memperoleh data yang sebenarnya dan langsung di lapangan.

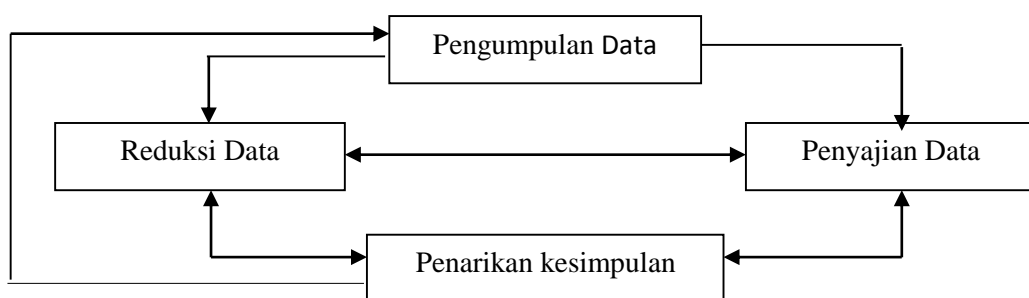
4.6.3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara menjangkau data sekunder menggunakan buku-buku teks, dokumen-dokumen serta informasi yang terkait.

4.7. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis interaktif yaitu pada saat proses pengumpulan data peneliti tetap bergerak diantara: reduksi data (penyeleksian atau penyederhanaan data), penyajian data serta penarikan kesimpulan/verifikasi. Ketiga komponen tersebut, aktivitasnya berbentuk hubungan relasional sebagai siklus. Artinya, setelah pengumpulan data berakhir, peneliti mulai bergerak secara teratur ke reduksi data, kemudian penyajian data serta penarikan kesimpulan, sehingga kesimpulan akhir terjadi.

Apabila peneliti masih merasa belum mantap atas kesimpulannya karena ada kekurangan dalam reduksi data dan penyajian datanya, maka peneliti dapat menggali dalam *fieldnote*. Apabila dalam *fieldnote* tidak ada data yang dimaksud, maka peneliti harus mengadakan pengumpulan data lagi untuk memperoleh analisisnya. Proses analisa interaktif dapat digambarkan melalui skema :



Sumber : Milles dan Huberman, 1992 : 20

Gambar 2. Model Analisis Interaktif

Keterangan Gambar:

1. Reduksi data: Sebagai proses pemilahan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data 'kasar' yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.
2. Penyajian data: Sebagai kumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengamatan tindakan.
3. Penarikan kesimpulan/verifikasi: Kegiatan mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola dan penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin. Alur sebab akibat dan proposisi, kemudian mengikat lebih rinci dan mengakar dengan konkret;

4.8. Validitas Data

Validitas data merupakan faktor yang penting dalam penelitian kualitatif. Ada beberapa teknik yang dapat digunakan untuk mengetahui validitas data. Dalam penelitian ini digunakan triangulasi data yaitu data sumber. Model ini berarti suatu model validitas data yang diperoleh dan membandingkan dengan mengecek derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif yang menurut Patton (dalam Moleong, 1990 : 178) model ini dapat diperoleh dengan jalan :

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
- c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.

- d. Membandingkan keadaan dan prespektif seseorang dengan pandangan orang seperti orang biasa, orang berpendidikan, orang berada dan orang pemerintahan.
- e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Penelitian ini dalam memperoleh keabsahan data juga digunakan triangulasi data yang merupakan teknik pemeriksaan mengenai keabsahan data yang memanfaatkan keabsahan yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut (Moleong, 1990:179).

BAB V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1. Sejarah Perkembangan Partai Persatuan Pembangunan

5.1.1. Cikal Bakal Partai Persatuan Pembangunan

Membicarakan salah satu partai Islam tidaklah bisa dilepaskan dari sejarah berdirinya Negara Indonesia. Sedangkan membicarakan sejarah berdirinya Negara Indonesia, juga tidak bisa dilepaskan dari pergulatan pemikiran dan gagasan-gagasan politik. Salah satu pemikiran politik yang mewarnai dinamika sejarah bangsa Indonesia adalah pemikiran politik Islam lewat para tokoh Islam pendiri bangsa ini. Pemikiran politik Islam yang dimanifestasikan lewat organisasi pergerakan dengan ideologinya menjadi peta politik tersendiri yang pada akhirnya harus berujung pada sebuah konflik dalam memperebutkan kekuasaan, ideologi negara, sistem negara dan konstitusi negara.

Ketika gerakan politik Islam gagal dalam merealisasikan gagasan-gagasannya lewat jalur politik di parlemen pada masa-masa awal Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Beberapa gerakan ini kemudian bermutasi menjadi sebuah gerakan perlawanan bersenjata yang berujung pada tuntutan pemisahan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Setidaknya sejarah mencatat peristiwa besar yang menjadi akumulasi gerakan politik Islam, yaitu peristiwa pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) yang diproklamakan oleh Soekarmadji Maridjan Kartoesowirdjo pada tanggal 7 Agustus 1949 di Tasikmalaya, Jawa Barat. Keberhasilan pemerintah Soekarno dalam menumpas gerakan DI/TII ini seolah menjadi sinyal berakhirnya gerakan politik Islam lewat jalur pemberontakan.

Dalam perkembangannya, konsensus mengenai pengakomodasian nilai-nilai Islam dalam konstitusi negara tercermin dari Falsafah Pancasila dengan nilai kebhinekaan yang tertuang dalam lima sendi khususnya sila pertama, yang berbunyi “Ketuhanan yang maha Esa”. Falsafah Pancasila seolah menjadi obat yang mujarab dalam mengakomodasi khasanah pemikiran politik yang berkembang pasca proklamasi. Cita-cita untuk mendirikan Negara Islam harus kandas ditengah jalan.

Dalam ranah politik parlemen, gerakan politik Islam tidak surut, sebagai manifestasi yang memperjuangkan tegaknya nilai-nilai Islam. Salah satu partai dengan gagasan Islam yang paling besar adalah Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) dalam naungan sistem Parlementer. Walaupun pada akhirnya nasib Masyumi juga kandas di tengah jalan sebagai akibat dituduhnya elite-elite politik Masyumi terlibat gerakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (Permesta).

Setelah kekuasaan Soekarno runtuh, Rezim Orde Baru mencoba melakukan pendekatan dengan kalangan-kalangan Islam, salah satunya dengan merehabilitasi tokoh-tokoh Masyumi dan diperbolehkan aktif dalam politik dengan meleburkannya ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Di sinilah, pola perjuangan gerakan Islam mulai mengalami perubahan, atau bisa dikatakan dipaksa berubah dan mau tidak mau harus mengakomodasikan paradigma perjuangannya sesuai dengan agenda politik Orde Baru. Ini bisa dipahami sebagai akibat menguatnya struktur dan infrastruktur politik yang dibangun oleh Rezim Orde Baru pimpinan Soeharto. Bahkan pada perkembangannya di tingkat pusat gerakan

perjuangan Politik Islam hanya sebatas etalase politik yang pada ujungnya terlihat sebagai politisasi gerakan politik Islam oleh Rezim Orde Baru.

5.1.2. Terbentuknya Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

Di tingkat bawah, hasrat dalam memperjuangkan nilai-nilai Islam lewat jalur politik parlemen tidak surut, apalagi setelah Orde Baru pada tahun 1973 melakukan penyederhanaan partai politik menjadi tiga partai (Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Secara ideologis, pembagian pemilih terbagi menjadi tiga, yakni pemilih ideologis Islam yang mewakili PPP, pemilih ideologis Pancasila yang mewakili Golkar dan pemilih ideologis nasionalis sekuler yang mewakili PDI.

Pada fase ini, pendongkrak suara PPP tidak bisa dilepaskan dari peran para tokoh Ulama yang menjadi corong gerakan politik PPP dalam meraup suara. Ulama dan santri menjadi ujung tombak di tataran akar rumput dalam menyebarkan jargon-jargon Islam sebagai cara merebut simpati pemilih. Kehadiran tokoh-tokoh ulama dalam kancah politik praktis pada masa Orde Baru menjadi sebuah gambaran bahwa harapan untuk menanamkan nilai-nilai Islam dalam ranah sebuah hukum negara (syariat) masih besar. Kehadiran tokoh-tokoh Ulama yang berdiri dalam barisan PPP menjadi faktor pendukung terbesar sehingga PPP dalam setiap Pemilu, PPP memperoleh suara kedua terbesar setelah Golkar.

Kehadiran ulama dalam politik praktis pada masa Orde Baru masih didasari atas besarnya hasrat tokoh-tokoh Ulama dalam mengusung cita-cita penegakan syariat Islam, sehingga bisa dikatakan keikutsertaannya dalam politik praktis

sebagai manifestasi perjuangan gerakan politik Islam yang diestafetkan kepada mereka oleh para pendahulunya. Orientasi gerakan politik ulama pada waktu itu tidak semata-mata meraih kekuasaan politik.

5.1.3. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Kabupaten Tasikmalaya

Kabupaten Tasikmalaya adalah salah satu wilayah sebagai pendulang suara bagi PPP. Fakta tersebut tidak mengherankan, karena Kabupaten Tasikmalaya memiliki identitas sebagai wilayah yang kental akan nilai-nilai Islam. Nuansa Islam yang menjadi identitas Kabupaten Tasikmalaya tercermin dari banyaknya tokoh-tokoh ulama yang berpengaruh dan berdirinya ratusan pesantren.

Selain itu juga, Isu-isu penegakan nilai-nilai Islam yang disponsori oleh PPP menjadi isu yang laris di Kabupaten Tasikmalaya, hal ini kemudian ditopang dengan aktivitas politik para Ulama di Kabupaten Tasikmalaya berlabel atribut PPP yang seiring sejalan dengan agenda isu penegakan nilai-nilai Islam. Kabupaten Tasikmalaya menjadi “lambung” suara bagi PPP tidak dilepaskan dari massifnya gerakan politik Ulama didukung dengan kultur masyarakatnya yang religius dengan orientasi perjuangan sebagai jalan mengimplementasikan nilai-nilai Islam dalam lingkup negara.

Pasca Reformasi, seiring dengan diimplementasikan otonomi daerah dengan mekanisme pemilihan kepala daerah langsung dan bermunculannya partai baru, termasuk partai Islam, identitas politik ulama terpecah ke beberapa partai politik. Partai politik yang menjadi ajang hijrahnya para ulama di Kabupaten

Tasikmalaya diantaranya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Bintang Reformasi (PBR) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Perubahan arah politik ini di atas, tentunya berpengaruh terhadap peta politik khususnya peta politik ulama di Kabupaten Tasikmalaya, hal ini secara otomatis juga merubah pandangan politik ditingkat akar rumput. Persaingan para ulama dalam perahu partainya masing-masing ini memunculkan sebuah fenomena baru, yaitu semakin ketatnya persaingan dalam merebut pemilih "Islam" di kabupaten Tasikmalaya dan terpecahnya kekuatan partai Islam. Yang lebih ironis lagi adalah terjadinya perubahan orientasi gerakan politik ulama kearah yang lebih pragmatis. Pada masa kekuatan politik Islam masih berada dalam satu partai PPP, gerakan politik Ulama lebih didasarkan pada faktor ideologis kegamaan yang berkuat pada isu-isu ke-Islaman dan berorientasi pada penerapan syariat Islam.

Faktor ideologis yang menempatkan Islam sebagai ideologi partai menempatkan PPP sebagai partai dominan yang menempati urutan terbesar di Kabupaten Tasikmalaya. Pengaruh ideologi Islam PPP tidak terlepas dari sosio-kultural masyarakat Kabupaten Tasikmalaya yang religius-Islami. lahirnya ulama-ulama kharismatik yang memimpin pondok-pondok pesantren di Kabupaten Tasikmalaya, menempatkan PPP sebagai partai yang paling memikat hati masyarakat kabupaten Tasikmalaya, relasi antara sosio-kultural dan ideologi Islam dalam partai-partai Islam mempengaruhi sosio-politik di Kabupaten Tasikmalaya, sehingga isu-isu keislaman yang diusung partai-partai Islam di Kabupaten Tasikmalaya menjadi isu politik yang paling banyak diminati.

Pasca Reformasi dimana jumlah partai politik diperbanyak, situasi sosio-politik di Kabupaten Tasikmalaya tidak banyak berubah, dimana partai-partai Islam masih menjadi partai dominan yang mempengaruhi isu-isu keislaman dimana ketokohan ulama menjadi lokomotif penggerak masa ditataran akar rumput. Pasca Reformasi kekuatan partai Islam terpecah menjadi dua kekuatan besar, yakni PPP dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Secara tidak langsung pecahnya kekuatan partai Islam membuat pecahnya keberpihakan politik para ulama kharismatik. Dukungan secara tradisional dan secara formal, yakni masuknya beberapa tokoh ulama menjadi elite partai politik, menambah dinamika wacana-wacana politik yang mengusung isu-isu keislaman.

Populernya isu-isu dan wacana-wacana politik keislaman di Kabupaten Tasikmalaya, menempatkan posisi ulama sebagai sentral yang dapat mengumpulkan dukungan politik dari akar rumput. Peta dukungan politik yang selama dibangun di tataran akar rumput kepada ulama terutama disandarkan pada satu harapan tentang kondisi yang ideal mengenai implementasi kebijakan yang mengadopsi nilai-nilai Islami dalam membangun pemerintahan di Kabupaten Tasikmalaya.

Citra yang selama ini dikembangkan oleh tokoh-tokoh ulama dengan kendaraan politiknya masing-masing membawa pesan dan harapan akan lahirnya nilai-nilai ideal implementasi kebijakan yang bernuansakan syariat Islam. Hal ini direspon oleh masyarakat sebagai kendaraan dan konsolidasi kekuatan untuk menciptakan nuansa Islami yang berlandaskan nilai-nilai syariat di Kabupaten Tasikmalaya.

Ada fenomena yang berbeda khususnya pasca Reformasi, dimana kekuatan partai-partai Islam terpecah menjadi beberapa kekuatan, dan dukungan tradisional dan formal dari tokoh-tokoh ulama di Kabupaten Tasikmalaya ikut terpecah. Fenomena munculnya ketidakpercayaan masyarakat yang selama ini membangun relasi dukungan ideologis dan relasi politis kepada para ulama kharismatik yang menggerakkan kendaraan partai Islam. Ketidakpercayaan tersebut menyangkut eksistensi gerakan politik ulama yang sudah tidak konsisten memperjuangkan nilai-nilai syariat Islam dalam panggung politik. Masyarakat kini menilai bahwa gerakan politik ulama lewat masing-masing partai Islam sudah tidak memiliki militansi yang kuat terhadap komitmen keislaman di Kabupaten Tasikmalaya, walaupun masih ada hanya sebatas jargon-jargon politis untuk meraih kalangan pemilih ideologis dan tradisional. Keadaan seperti ini menempatkan partai-partai Islam sebagai partai yang dipandang tidak lagi memiliki nilai-nilai ideologis ke-Islaman. Pragmatisme peran ulama dalam politik praktis menambah kesan bahwa partai Islam secara umum hanya dipahamai sebagai alat atau kendaraan untuk menduduki jabatan-jabatan politik bagi para elite politik dari kalangan ulama tanpa adanya militansi dan komitmen yang kuat akan tegaknya nilai-nilai syariat.

Secara langsung, fenomena seperti menempatkan ulama sebagai aktor politik yang awalnya dipercaya sebagai lokomotif gerakan politik Islam di Kabupaten Tasikmalaya, menjadi aktor politik yang dianggap tidak memiliki visi dan misi keislaman. Gerakan politik ulama sudah dianggap sebagai gerakan politik yang tidak ideologis dan terkesan hanya mementingkan kepentingan politik pribadi

dan golongan elite partai. Ada semacam perubahan orientasi gerakan politik ulama yang tadinya berorientasi ideologis menjadi berorientasi pragmatis.

Posisi Partai Persatuan Pembangunan saat ini mewujudkan menjadi kekuatan yang sulit untuk digantikan. Partai yang di masa Orde Baru hanyalah partai pelengkap kini menguasai jabatan strategis, baik di Kota maupun Kabupaten Tasikmalaya. Di Kabupaten Tasikmalaya partai ini menguasai kursi bupati dan ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya. Saat ini ketua PPP Kabupaten Tasikmalaya dipimpin oleh H. Ruhimat, M.Pd yang juga menjabat Ketua DPRD masa bakti 2014-2019. Sedangkan Bupati Tasikmalaya H. UU Ruzhanul Ulum sebelumnya menjabat Ketua PPP Kabupaten Tasikmalaya, kini menjabat penjabat sementara ketua DPD PPP Jawa Barat. Begitu juga dengan Kota Tasikmalaya, di mana Wali Kota Tasikmalaya dan Ketua DPRD nya merupakan elit PPP Kota Tasikmalaya.

5.1.3. *Decisional Autonomy* dalam Pelembagaan PPP Kabupaten Tasikmalaya

Mengkaji apa yang dikemukakan oleh Randall dan Svasand (2002) sebagaimana telah di *review* dalam tinjauan pustaka, bahwa pelembagaan partai politik adalah proses pematangan baik secara struktural dalam rangka mempolakan perilaku maupun secara kultural dalam mempolakan sikap dan budaya, maka dalam hal peneliti menemukan bahwa dominasi PPP di Kabupaten Tasikmalaya tidak bisa dilepaskan dari warisan eksistensi PPP pada saat Rezim Orde Baru. Artinya secara struktural PPP di Kabupaten Tasikmalaya memang sudah mapan, baik secara keorganisasian yang melingkupi kepengurusan hingga tingkat ranting maupun kemampuan dalam fungsi-fungsi partai politik, yakni komunikasi politik,

pendidikan politik dan rekrutmen politik, hanya saja karena rezim Orde Baru yang menggunakan pendekatan otoriterianisme, penggunaan intimidasi, manipulasi dan politisasi birokrasi maka suara ataupun kekuatan PPP di Kabupaten Tasikmalaya tidak bisa mengimbangi kekuatan Golkar pada waktu itu, tetapi secara structural PPP di Kabupaten Tasikmalaya telah siap tempur manakala reformasi yang menjatuhkan kekuasaan Soeharto terjadi⁹.

Karena kesiapan struktural tersebut ketika Reformasi bergulir, Soeharto lengser dan tuntutan demokratisasi, kebebasan dan tuntutan-tuntutan terhadap hak-hak politik menjadi isu yang menggerakkan kekuatan massa, maka PPP di Kabupaten Tasikmalaya tampil sebagai partai yang banyak merebut simpati masyarakat Tasikmalaya. PPP berhasil meraih simpati masyarakat dengan menggambarkan dirinya sebagai partai yang “terdzholimi” oleh penguasa Orde Baru. Isu “terdzholimi” ini yang dibungkus dengan wacana-wacana, gagasan-gagasan dan isu-isu ke-Islaman menjadikan PPP di Kabupaten Tasikmalaya menjadi partai dominan pasca Reformasi.

Kemapanan secara struktural tersebut kemudian didukung oleh faktor kultural yang menempatkan PPP sebagai partai dominan di Kabupaten Tasikmalaya. Secara sosiologis, Tasikmalaya memiliki identitas ke-Islaman yang sangat kental, memiliki basis pesantren yang tersebar hampir di setiap kecamatan yang kemudian melahirkan ulama-ulama kharismatik yang disegani sekaligus sangat dipatuhi, dan banyak ulama kemudian menjadi aktivis Partai, atau eksistensinya mewakili kepentingan PPP. Keterkaitan antara faktor sosiologis akan

⁹ Hasil wawancara dengan Asop Sopiudin, anggota Fraksi PPP Kabupaten Tasikmalaya

identitas Tasikmalaya sebagai kota penuh nuansa ke-Islaman dengan berdirinya PPP sebagai partai “hijau”, memiliki simbol ke-Islaman, *platform*, visi-misi tujuan-tujuan ke-Islaman membuat PPP diyakini sebagai partai yang mewakili suara umat Islam. Jadi antara faktor struktural dan kultural akan mendominasi PPP di Kabupaten Tasikmalaya tidak terlepas dari dua pertautan tersebut, antara faktor struktural dan faktor kultural sama-sama saling mengisi, mempengaruhi satu sama lain, dan tidak bisa dikatakan mana yang lahir duluan.

Dari dua elemen yang saling mengisi tersebut, maka setelah Reformasi PPP di Kabupaten Tasikmalaya mampu mendominasi dengan dua kali berturut-turut mengisi jabatan Bupati dan menjadi fraksi mayoritas di DPRD. Walaupun setelah Reformasi banyak partai Islam bermunculan, yang sama-sama memiliki konsep perjuangan ke-Islaman bahkan suara Nahdhatul Ulama (NU) yang menjadi organisasi Islam *mainstream* di Kabupaten Tasikmalaya terpecah, karena pada waktu itu lahir Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai representasi suara kalangan Nahdhiyin (warga NU), tetapi PPP di Kabupaten Tasikmalaya tetap menjadi partai dominan. Sekali lagi ini menunjukkan bahwa secara struktural PPP telah siap dalam menyikapi perubahan sosial, yakni tuntutan Reformasi yang kemudian didukung oleh faktor kultural. Bahkan Asop Sopiudin¹⁰ mengatakan kultur-lah yang membesarkan PPP di Kabupaten Tasikmalaya.

Secara struktural adanya relasi dengan pesantren dan sosok Ulama itu sendiri membuat PPP di Kabupaten Tasikmalaya memiliki ruang-ruang pengkaderan “warisan” yang secara turun-temurun menjadi basis suara PPP.

¹⁰ Anggota Fraksi PPP DPRD Kabupaten Tasikmalaya periode 1999-2004. 2004-2009, 2014-2019

Adalah pesantren Miftahul Huda yang dulu didirikan oleh Almarhum KH. Khoer Affandi, sosok ulama yang vokal terhadap pemerintah Orde Baru yang kemudian berdiri secara struktural dalam kepengurusan PPP. Beberapa kali pernah berurusan dengan aparat karena kritis dan berada pada garda terdepan eksistensi PPP di Kabupaten Tasikmalaya. Setelah Orde Baru tumbang dan Ua Ajengan, sebutan bagi KH. Khoer Affandi wafat, amanat Ua Ajengan untuk terus meneruskan “perjuangan” dalam bentuk dukungan dan militansi kepada partai terus dipelihara, sehingga memunculkan mitos yang secara kultural menjadi sarana “rekrutmen” simpatisan fanatik, yakni adanya ungkapan “kualat” bila tidak mematuhi amanat Ua Ajengan.

Bisa dibayangkan berapa ribu santri dari berbagai angkatan yang tidak sedikit kemudian antara santriwan dan santriwati dijodohkan (*ta'aruf*) kemudian menikah, melahirkan keturunan dari “doktrin” dan ideologi politik yang sama dengan mitologi “kualat”. Maka dalam hal ini Himpunan Alumni Miftahul Huda (Hamida) bisa dikatakan sebagai organisasi yang mendulang suara untuk PPP, dan salah satu penyumbang suara terbesar yang mengantarkan H. Uu Ruzhanul Ulum menjadi Bupati sebagai bagian dari keluarga pesantren Miftahul Huda adalah dukungan Hamida.

Proses pembuatan kebijakan di PPP Kabupaten Tasikmalaya berawal dari bawah di mana PPP menampung aspirasi dari konstituen melalui pengurus Anak Cabang (PAC) kemudian ditampung di tingkat Cabang. Selain itu juga, memperhatikan ketentuan atau kebijakan dari atas (pusat). Menurut Ikbal Nasihin (pengurus PPP Kabupaten Tasikmalaya) bahwa proses penentuan kebijakan di PPP

Kabupaten Tasikmalaya sangat menjunjung tinggi suara dari konstituen dan anggota, namun juga dengan tetap memperhatikan garis kebijakan dari pimpinan (DPP PPP).

Ketika ditanya apakah PPP Kabupaten Tasikmalaya juga mendengarkan kepentingan lainnya atau pengaruh dari luar Parpol dalam pembuatan kebijakan, maka dijelaskan oleh Ikbal Nasihin bahwa hal tersebut tergantung dari kontelasi politik yang berkembang. Namun secara tegas tidak dimaknai sebagai pengaruh dari pihak luar. PPP dengan tegas menolak berbagai intervensi kepentingan politik dari luar dalam pembuatan kebijakan (*decisional authonomy*). Namun jika dipahami bahwa pengambilan kebijakan dan keputusan Parpol harus menyesuaikan dengan dinamika politik di sekitar. Elastisitas pembuatan kebijakan Parpol juga dipahami dalam konteks bahwa PPP sangat lentur dan adaptif dengan perkembangan dan sosio-politik masyarakat.

Dari informasi hasil wawancara dengan Ikbal Nasihin juga disampaikan bahwa diakuinya berbagai intervensi dan kesepakatan-kesepakatan politik sering terjadi khususnya dalam berbagai moment besar seperti Pemilu dan Pilkada. Untuk memutuskan kebijakan yang terkait dengan koalisi dan tidak, biasanya partai berpegangan kepada keputusan dari PPP pusat. Apa yang menjadi keputusan dan kebijakan pusat menjadi pegangan dalam pemilihan kebijakan di tingkat cabang. Namun biasanya pusat sebelum memberikan keputusan maupun kebijakan mengenai hal yang urgen terkait koalisi dan lainnya juga memperhatikan konstelasi politik lokal dan menguntungkan internal PPP itu sendiri.

Artinya PPP selalu memegang teguh apa yang menjadi ketentuan kepartaian, namun juga dinamis dalam menerjemahkan konstelasi dan peta politik yang dapat menguntungkan partai dan konstituen juga dapat menjadi marwah partai sebagai partai Islam. Apalagi dalam “hajatan” besar seperti Pemilukada, perundang-undangan mengatur bahwa pimpinan partai tingkat pusatlah yang mengeluarkan SK pencalonan resmi dari partai politik. Partai politik tingkat provinsi/kabupaten/kota hanya melaporkan dan mengusulkan ke tingkat pusat dan pusatlah yang menentukan. Keuntungan-keuntungan sesaat bagi partai yang tidak sesuai dengan aspirasi daerah harus diberangus dalam membangun otonomi dalam pengambilan kebijakan internal partai.

Dalam kesempatan lain peneliti juga menanyakan mengenai apakah ada intervensi dalam penentuan hasil rekrutmen calon pemimpin pusat atau daerah dari luar Parpol ?. H. Apip Ifan Permadi sebagai salah satu elit Parpol yang juga anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya dari PPP menegaskan bahwa hal tersebut dalam banyak kasus dapat terjadi namun tidak diartikan sebagai intervensi dari pihak lain. Hal tersebut jikalau ada terjadi karena pertimbangan internal Parpol dan untuk keuntungan Parpol.

Sebagai contoh, jikalau dalam Pilkada PPP mengambil kader yang bukan murni berasal dari luar partai, hal tersebut berdasarkan dari hasil kajian partai itu sendiri demi memenangkan kontestasi Pemilu atau Pemilukada. Namun PPP tetap sangat memeperhatikan loyalitas dan kerbersediaan yang bersangkutan menjadi kader PPP untuk masa yang akan datang dan menjunjung marwah perjuangan PPP yang selama ini dijunjung tinggi.

5.1.4. *Value Infusion* PPP Kabupaten Tasikmalaya

Dalam kajian penelitian sebelumnya telah dijelaskan bahwa besarnya PPP kabupaten Tasikmalaya hingga menjadi partai besar seperti saat ini adalah melalui upaya yang sangat berat. Misalnya upaya perbaikan citra (*reification*) yang pertama kali dilakukan pasca Reformasi adalah berusaha mengubah *image* publik bahwa Partai Persatuan Pembangunan (PPP) adalah partai pelengkap (*gurem*) di masa Orde Baru. Menurut informan (Ruhimat, Ketua PPP Kabupaten Tasikmalaya saat ini), para elit PPP saat itu berusaha mengubah *image* tersebut. Walaupun Tasikmalaya memiliki sosio-kultural Kota Santri dan dikenal sebagai basis PPP, namun jika dibandingkan Golkar, PPP di masa Orba tetap sebagai partai *Gurem*. Partai ini hanya unggul di pedesaan-pedesaan Tasikmalaya. Upaya perubahan *image* tersebut bukanlah tanpa maksud tertentu untuk hal-hal yang lebih strategis ke depannya terkait dengan popularitas dalam memenangkan Pemilu dan menguasai pemerintahan, yang sebelumnya terus-menerus dikuasai oleh Golkar dan militer.

Konstelasi politik pasca jatuhnya Orde Baru sangat mendukung bagi PPP dalam merubah *image* tersebut di atas. Paling tidak ada beberapa hal yang dilakukan untuk merubah citra partai “*gurem*” di masa Orde Baru, khusus konteks di Tasikmalaya sebagaimana diinformasikan oleh informan UU Ruzhanul Ulum (Mantan ketua PPP, Bupati Tasikmalaya sekarang). *Pertama*, PPP saat itu berupaya mencitrakan sebagai partainya “orang-orang Nahdatul ‘Ulama (NU). Upaya ini didasari bahwa Tasikmalaya merupakan wilayah di Jawa Barat yang sebagian besar masyarakatnya pengikut Organisasi Nahdatul Ulama. Oleh karena itu, upaya

pencitraan dengan melekatkan *image* PPP sebagai partainya Orang NU dianggap sebagai langkah tepat untuk meraih simpati masyarakat dalam memenangkan kontestasi melalui Pemilu Legislatif tahun 1999. Hal ini terbukti dengan kemenangan PPP sebagai partai yang mampu menempatkan wakilnya terbanyak di legislatif dan menempatkan elit partainya saat itu, yakni Tatang Farhanul Hakim sebagai Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya periode 1999-2004. Sedangkan untuk pemimpin eksekutif, Bupati masih dipegang oleh Golkar dengan latar belakang militer yakni H. Sulyana WH yang memimpin Tasikmalaya sejak 1996-2001. Namun pada pemilihan 5 tahun berikutnya yakni tahun 2001 Tatang Farhanul Hakim justru mampu menyisihkan H.Sulyana Wirahadi Subarata sebagai Bupati Tasikmalaya periode 2001-2006 lewat pemilihan oleh Anggota DPRD, sehingga jabatan Ketua DPRD ditinggalkannya. Tatang Farhanul Hakim kemudian terpilih kembali lewat Pemilihan Kepala Daerah Langsung yang pertama kali oleh rakyat sebagai Bupati Kabupaten Tasikmalaya periode 2006-2011 (Kota Tasikmalaya telah menjadi Daerah Otonom Baru). Pusat pemerintahan kemudian dipindahkannya ke Singaparna, kawasan Gunung Koneng Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Agung dan Gunawan, 2015).

Dalam konteks ini perlu dipahami bahwa kita semua mengetahui PPP sesungguhnya bukanlah partai milik Nahdatul Ulama (NU) saja, bahkan di masa-masa awal pergerakan Indonesia tokoh-tokoh yang membidani PPP merupakan tokoh-tokoh yang dulunya menghidupkan Masyumi. Tetapi pencitraan yang dilakukan di Tasikmalaya, khususnya pasca Reformasi (di masa Tatang Farhanul

Hakim berkuasa) dengan mendekati NU sangatlah efektif dan hal tersebut berhasil menjadikan PPP “seolah-olah” partainya Orang NU di masa itu.

Tatang Farhanul Hakim merupakan tokoh sentral di masa periode ini, sebagai ketua PPP Kabupaten Tasikmalaya, dan juga sebagai Bupati beliau dianggap memiliki karakter kepemimpinan yang kuat dalam menguasai Birokrasi Pemerintahan dan menginternalisasi nilai-nilai PPP ke semua stafnya. Di masanya ini PPP mewujud menjadi partai penguasa. Partai yang disegani peraih kursi terbanyak di parlemen Kabupaten di pemilu 2004 yakni 12 kursi. Beliau juga merupakan salah seorang tokoh sentral dari organisasi Nahdatul Ulama, sehingga tidak heran jika konstituen PPP banyak tersebar di kalangan Nadhatul Ulama. Walaupun ada PKB pasca Reformasi, tidak dengan serta merta PPP ditinggalkan oleh pengikut NU. Bahkan dapat dikatakan sebagian besar warga Naddiyin menjadi konstituen PPP. Sehingga pantaslah jika PPP menjadi pemenang dalam Pemilu Legislatif tahun 2004, pemenang Pilkada Tahun 2001, dan Pemenang Pemilukada Tahun 2006.

Kedua, upaya membangun citra positif Partai Persatuan Pembangunan (PPP) juga dilakukan melalui pendekatan kalangan elit politik PPP melalui pesantren. Elit-elit PPP generasi awal Reformasi seperti Tatang Farhanul Hakim, UU Ruzhanul ‘Ulum, H. Ruhimat dan lainnya merupakan tokoh-tokoh yang lekat dengan pesantren. Tatang dikenal sebagai orang pesantren yang kemudian menjadi politisi PPP. Keluarga besarnya merupakan tokoh dan pendiri di beberapa pesantren besar di Tasikmalaya, seperti Sukahideng dan Cipasung. Sedangkan UU Ruzhanul ‘ulum merupakan salah satu pimpinan Pondok Pesantren terbesar di Tasikmalaya,

yakni Pondok Pesantren Miftahul Huda, Manonjaya. Beliau merupakan cucu pendiri pesantren tersebut (KH. Khoer Affandi). Dalam peta politik di Kabupaten Tasikmalaya, bahkan di Tasikmalaya secara umum banyak dikuasai oleh 4 pesantren besar tersebut, yakni Miftahul Huda, Cipasung dan Sukahideng-Sukamanah Tasikmalaya.

Dalam konteks penanaman nilai-nilai (*value infusion*), terdapat beberapa hal penting diantaranya : *pertama*, nilai-nilai yang ditransformasikan oleh PPP melalui pengurus adalah nilai-nilai ke-Islaman tanpa melihat organisasi dan background ke-Islaman yang penting tidak menyimpang dari ajaran Islam itu sendiri. Kedua, PPP merupakan satu-satunya partai Islam di Indonesia yang anggota harus beragama Islam. Oleh karena itu, dapat dikatakan PPP menjadi wakil partai Islam satu-satunya yang hanya menyoal konstituen masyarakat yang beragama Islam. Ketiga, penanaman nilai-nilai ke-Islaman salah satu metodenya melalui ulama. PPP adalah partai yang sangat dekat dengan ulama. Menurut Iqbal Nasihin (pengurus PPP Kabupaten Tasikmalaya) transformasi nilai-nilai kepartaian dilakukan melalui pertemuan-pertemuan di PAC dan kegiatan diskusi di Pengurus Cabang Kabupaten Tasikmalaya.

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

Dari penjelasan hasil penelitian, analisis dan pembahasan di atas terlihat bahwa dari hasil analisis dan wawancara dari berbagai informan menunjukkan hal-hal sebagai berikut :

Pertama, terkait dengan dimensi *decisional authonomy* PPP di Kabupaten Tasikmalaya merupakan partai yang mapan, hal-hal yang terkait dengan masalah internal dapat diselesaikan lewat kebijakan yang dibuat dengan berpedoman terhadap peraturan kepartaian (AD/ART). Kedewasaan dan kemapanan tersebut merupakan bentuk nyata selama puluhan tahun PPP eksis dalam perpolitikan nasional, khususnya di Tasikmalaya. Kesulitan-kesulitan yang didapatkan PPP di tingkat nasional sama sekali tidak terjadi di lokal Tasikmalaya. Fungsi kepartaian relatif dilaksanakan lebih intensif dibandingkan dengan partai lain. Aktifitas-aktifitas perkaderan berjalan walaupun di luar hajatan politik seperti Pemilu dan Pemilukada. Hal ini menunjukkan hal-hal yang ideal dari yang seharusnya dilakukan oleh partai politik dilaksanakan.

Kedua, bahwa penanaman nilai-nilai kepartaian dilakukan melalui pertemuan-pertemuan rutin, pengajian, ajakan ulama yang merupakan figure yang dituakan oleh PPP Kabupaten Tasikmalaya. Dalam praktek politik, Hal ini juga efektif dalam mempengaruhi konstituen di Tasikmalaya. Kemenangan UU Ruzhanul Ulum dalam Pemilukada langsung tahun 2011 menjadi bukti kuat bahwa Orang Pesantren dapat menjadi Orang Nomor Satu di Kabupaten Tasikmalaya dengan PPP sebagai kendaraan politiknya. Hal ini membuktikan bahwa sebagai partai Islam PPP masih sangat dipercaya mengusung nilai-nilai ke-Islaman selama

ini. Gambaran ini menguatkan konsep dan teorinya Randall dan Svasand (2002) yang mengemukakan bahwa semakin intensif dan maksimalnya dimensi-dimensi institusionalisasi dijalankan oleh partai, maka partai tersebut akan semakin mantap dan populer bahkan memudahkan dalam penguasaan ranah publik dan negara. Hal tersebut jelas terbukti dalam gambaran di Kabupaten Tasikmalaya seperti yang telah dijelaskan di atas.

Saran untuk partai politik lainnya adalah kesuksesan-kesuksesan politik yang telah dilakukan PPP Kabupaten Tasikmalaya dalam menanamkan nilai-nilai kepartaian sehingga menjelma menjadi satu-satu partai Islam yang memiliki karakter ideologis perlu di kembangkan juga di partai lainnya. Kemampuan daya juang dan elastisitas para elit politik PPP membaca zamannya mampu memberikan dignity yang baik bagi partai ini sebagai partai politik yang disegani di Tasikmalaya. Disisi lain berbagai kelemahan juga masih muncul dari decisional authonomy, dimana dalam banyak kasus partai-partai, termasuk PPP sering terjebak dalam kartelisasi politik ketika berhubungan dengan untung rugi dalam dukung mendukung calon dalam Pemilukada dan pemilihan umum lainnya.

Penelitian ini memang belumlah sempurna, sehingga perlu dialnjutkan dalam memahami institusionalisasi kepartaian yang lebih mendalam khususnya ketika ada tantangan yang muncul seperti dalam kasus pemilihan Gubernur dan Pemilu Legislatif dan Presiden tahun 2018/2019 ke depan.

DAFTAR PUSTAKA

- La Palombara, Joseph dan Myron Weiner (1966) dalam bukunya *Political Parties and Political Development*, Princeton University Press.
- Moleong, L. J, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Pamungkas, Sigit, 2009, *Perihal Pemilu*, Laboratorium Jurusan Ilmu Politik dan Pemerintahan UGM, Cet I, Yogyakarta.
- Randall, Vicky dan Lars Svasand (2002), *Party Institutionalization in New Democracies, Party Politics*, Vol.8 No.1, Sage Publication, London.
- Romli, Lili dkk, 2003, *Potret Partai Politik Pasca Orde Baru*, P2P-LIPI, Jakarta.
- Salim HS, dkk, 1999, *Tujuh Mesin Pendulang Suara : Perkenalan, Prediksi dan Harapan Pemilu 1999*, LKiS, Yogyakarta.
- Tandjung, Akbar, 2007, *The Golkar Way : Survival Partai Golkar dalam Turbulensi Politik Era Transisi*, Gramedia, Jakarta.
- Tomsa, Dirk (2008), *Party Politics and Democratization in Indonesia : Golkar in The Post- Soeharto Era*, Routledge, London and Newyork.

Sumber Lain :

- PKS Jakarta Selatan, 2004, tersedia <http://www.pks-jaksel.or.id/Article128.html>, *Hasil Poling LSI : Suara Golkar dan PKS Diperkirakan Naik pada Pemilu 2004*, dilihat 21 Maret 2014.
- Situs Resmi Golkar, 2014, tersedia di <http://www.Golkar.or.id/index.php?op=profil>, dilihat 15 Juli 2014.
- Vicky Randall dan Lars Svasand (2002), *Party Institutionalization in New Democracies, Party Politics*, Vol.8 No.1, Sage Publication, London, hal 5-29, tersedia di <http://ppq.sagepub.com>, dilihat 15 Januari 2013.